PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA BITUNG 2003-2013

THE INFLUENCES OF THE LOCAL REVENUE AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON THE CAPITAL EXPENDITURES IN BITUNG CITY ON 2003-2013

Tria Saskia Dama¹, Paul David Elia Saerang², dan Inggriani Elim³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia E-mail: damatriasaskia@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bitung dalam mengelolah anggaran keuangannya diberikan kewenangan penuh dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. PAD dan DAU merupakan beberapa sumber penerimaan dalam APBD, begitupula dengan Belanja Modal merupakan salah satu bagian belanja/pengeluaran dalam APBD. Di Kota Bitung sendiri sumber PAD dinilai masih kurang digali, hal tersebut tercermin dari nilai PAD yang cenderung berfluktuatif, sementara belanja modal dinilai kurang produktif dan proporsinya sedikit, hal tersebut juga dapat dilihat dalam angka belanja modal yang cenderung berfluktuatif. Hal tersebut merupakan masalah yang harus dikaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang komponen APBD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk di nilai pengaruhnya terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kota Bitung periode 2003-2013. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel PAD (X₁) dan DAU (X₂) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (Y₁) sebagai variabel dependen. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif regresi linear berganda dengan menggunakan alat IBM *SPSS 21*. Hasil dari pengujian ini menunjukan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja modal secara parsial dan simultan.

Kata kunci : PAD, DAU, Belanja Modal

ABSTRACT

Bitung Government in managing the financial budget by given full authority with no-interference from the central government. It is a sign of management reforms that better governance (Good Governence). Local own revenue (PAD) and General allocation fund (DAU) are several sources of revenue in the budget, nor with the Capital Expenditure is one part of the shopping/spending in the budget. In the city of Bitung own sources of revenue assessed to be less explored, it is reflected in the value of PAD are likely to fluctuate, while capital expenditures were considered less productive and less-proportion, it can also be seen in the figures tend to be volatile capital expenditures. This is an issue that should be studied more deeply.

The purpose of this study is trying to collect the empirical evidence related components of the budget include the Local Own Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) on the Capital Expenditure for value its influences on the government of Bitung during period 2003-2013. This research was conducted by collecting data related to these variables. The variables in the research are PAD (X_1) and DAU (X_2) as the independent variable and the Capital Expenditure (Y_1) as the dependent variable. The method used in this research is quantitative method of multiple linear regression by using IBM SPSS 21 as the software tools. The results show that PAD and DAU have a significant and positive impact on capital expenditures both partially and simultaneously.

Key Words: Local Own Revenue, General allocation of funds, and Capital Expenditures

1. PENDAHULUAN

Latarbelakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang (UU) 22/1999 dan direvisi menjadi UU 32/2004 melibatkan dua pihak yakni eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah, dan berkewajiban membuat draft/rancangan APBD. Rancangan tersebut hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran oleh legislatif. Peranan akuntansi tentunya sangat diperlukan untuk membangun transparasi serta sebagai kontroler terhadap Penggunaan danah APBD. Dalam APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang di berikan oleh pusat ke daerah yang di sebut Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pendapatan Lainlain yang Sah.Secara khusus UU No. 32 Tahun 2004 mengatakan salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat selama 12 bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti berbentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, buku perpustakan, hewan dan lain- lain. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Rendahnya belanja modal merupakan suatu permasalahan karena belanja modal merupakan unsur penting dalam pelayanan publik, administarsi pemerintahan, terlebihhnya terhadap suatu perekonomian. Dalam rangka meningkatkan perekonomian belanja modal merupakan aspek penting dalam hal pengeluaran. Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD.

Peningkatan PAD dari hasil pengelolaan keuangan daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Situasi yang terjadi tidak berbanding, peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang, hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.Pentingnya pemerataan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi Umum diambil dari Dana Transfer Daerah pada hakikinya merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai proses penambahan stok modal berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll atau sekalipun pelayanan publik haruslah sesuai dengan pengalokasian belanja modal.

Tujuan Penelitian

- 1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Bitung.
- 2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Bitung.
- 3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Bitung

Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah". APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD, Pemerintah Daerah serta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah kemandirian pemerintaan daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. PAD bagi pemerintah sangatlah penting karena PAD menunjukan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah (Taufik, 2012).

Dana Alokasi Umum

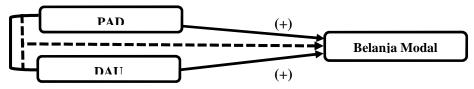
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan atau DAU dan UU No. 33 pasal 1 Tahun 2004, DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Modal

Menurut (Halim, 2009) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2006 pasal 53, Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Asiri, 2016). Menurut Asiri (2016) Belanja modal ini diharapkan dapat menambah keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga setiap pengeluaran belanja modal harus diperhitungkan kegunaan manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan dana belanja yang

di keluarkan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan data dan teori hasil penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh terhadap Belanja ModalH2: DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal

H3: PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder*time series* tahun 2003–2013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan pada Kantor BPS Kota Bitung. Waktu penelitian selama dua bulan mulai dari bulan Februari sampai April, 2016.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni dengan cara mendatangi langsung instansi terkait untuk mengambil dan mengumpulkan data yang telah diolah dan yang telah tersedia di instansi tersebut. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan dan eksplorasi serta *searching data* melalui internet. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur sebagai variabel *independent* (bebas) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X_1 , dan Dana AlokasiUmum (DAU) sebagai variabel X_2 . Variabel *Dependent* (terikat) adalah Belanja Modal sebagai variabel Y_1 .

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari

pemerintah pusat. PAD Kota Bitung terdiri dari pajak daerah Kota Bitung, retribusi daerah Kota Bitung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Kota Bitung diukur menggunakan nilai jutaan/miliaran (Rp), kemudian dibuat persamaan dalam bentuk Ln %.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bitung untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. DAU Kota Bitung diukur menggunakan nilai jutaan/miliaran (Rp), kemudian dibuat persamaan dalam bentuk Ln %.

Variabel Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud, belanja modal Kota Bitung merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Belanja modal Kota Bitung diukur menggunakan nilai jutaan/miliaran (Rp), kemudian dibuat persamaan dalam bentuk Ln %.

Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data menggunakan analasis statistik deskriptif sederhana. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam benuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan intrepretasikan. Metode ini berupa metode analisa tabel yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa perkembangan yang terjadi dalam Keuangan Daerah di Kota Bitung secara umum dan PAD, DAU, serta Belanja Modal secara khusus.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = +b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

```
Y = Belanja Modal (Variabel Terikat); b_1 dan b_2 = Koefisien Regresi = Konstanta; <math>X_1 = PAD (Variabel Bebas 1) X_2 = DAU (Variabel Bebas 2) e = Kesalahan Pengganggu Jadi persamaannya menjadi : Belanja Modal = + b_1PAD + b_2DAU + e
```

Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu variabel diakatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Jika arah perubahannya searah maka kedua variabel memiliki korelasi positif. Sebaliknya, jika perubahannya berlawanan arah, kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif. Jika perubahan variabel tidak diikuti variabel lainnya maka dikatakan tidak berkorelasi (Suliyanto, 2011).

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentsase variasi variabel bebas pada model dapat di terangkan oleh variabel terikat. Koefesien determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Secara umum koefisien determinasi untuk data saling (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing masing pengamatan, sedangkan untuk data rutin waktu ($time\ series$) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang lebih tinggi.

Koefiesien Determinasi Berganda (R²) dalam penelitian ini yakni besarnya proporsi atau sumbangan PAD dan DAU terhadap variasi naik turunnya proporsi Belanja Modal Nilai koefesien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula (Suliyanto, 2011):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (\gamma - \hat{y})^2}{\sum (\gamma - \bar{y})^2}$$

Dimana:

R² = Koefesien Determinasi

 $y - \hat{y} = \text{Kuadrat selisih nilai Y rill dan Y prediksi}$

 $y - \bar{y} = \text{Kuadrat selisih nilai Y rill dan Y rata-rata}$

Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Jika $R^2 = 1$ berarti 100 persen total variasi veriabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya dan menunjukkan ketepatan terbaik. Bila $R^2 = 0$ berarti tak ada total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya.

Uji t (Uji t Statistik)

Nilai t_{hitung} digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} (Suliyanto, 2011:45). Untuk menghitung ttabel digunakan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{|\mathbf{r}|}{|\mathbf{r}|}$$
 $t_{\text{tabel}} = n, k, 1$

Dimana:

j = Koefesien regresi variabel independen ke-i

Se (_i)= Standar error dari variabel independen ke-i

n = Jumlah data; k = Jumlah variabel

Dengan menentukan derajat keyakinan 95% (= 0.05)

Dimana: Jika t-hitung t-tabel /2 (n-k) maka Ho di terima Jika t-hitung t-tabel /2 (n-k) maka Ho di tolak

Pengujian Hipotesis tersebut sebagai berikut :

H0: 1 = 0 Artinya Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H1: 1 0 Artinya Variabel PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H0: 2 = 0 Artinya Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap BelanjaModal.

H2: 2 0 Artinya Variabel DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji F (Uji F)

Nilai F_{hitung} digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan (uji serempak), untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat/tergantung atau tidak. untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan: df (*degree of freedom*) , (k-1), (n-k) (Suliyanto, 2011:62). Untuk memahami lebih sederhana, Uji signifikansi serempak (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial secara serempak atau bersama-sama berbeda secara signifikan

dari 0 atau apakah ada pengaruh yang signifikan variabel bebas X_1 dan X_2 secara serempak terhadap variabel terikat Y. hipotesis yang digunakan adalah:

 H_0 : $_1 = _2 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

H₁: 1 2 0, artinya secara bersama-samaa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkn nilai F_{hitung} dengan , jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{hitung}}$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, dan jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{hitung}}$, maka H_0 diterima. Artinya variabel independen ecara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

Nilai F_{hitung} dapat diperoleh dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/R - 1}{(1 - R^2)/(n - R)}$$

Dimana: $R^2 = \text{Koefesien determinasi}$

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel independen ditambah *intercept* dari model estimasi

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Dari hasil penelitian yang di uji menggunakan SPSS 22 (Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkembangan PAD, DAU, dan Belanja Modal Pemerintahan Kota Bitung Tahun Anggaran 2003-2013. (Diolah, dalam ribuan rupiah)

Tahun	PAD	DAU	Belanja Modal
2003	Rp. 5.803.326	Rp. 114.150.000	Rp. 14.961.325
2004	Rp. 9.444.723	Rp. 119.755.000	Rp. 2.896.137
2005	Rp. 10.658.694	Rp. 131.493.000	Rp. 9.094.043
2006	Rp. 10.366.004	Rp. 217.379.000	Rp. 37.672.172
2007	Rp. 10.178.350	Rp. 243.233.000	Rp. 79.396.280
2008	Rp. 16.344.610	Rp. 271.735.114	Rp. 78.762.098
2009	Rp. 17.456.518	Rp. 271.229.725	Rp. 97.913.060
2010	Rp. 18.875.511	Rp. 274.294.139	Rp. 113.239.795
2011	Rp. 25.394.063	Rp. 304.453.621	Rp. 103.257.610
2012	Rp. 38.435.120	Rp. 379.300.339	Rp. 129.165.574
2013	Rp. 55.173.113	Rp. 421.672.562	*Rp. 191.297.564

Sumber: Bitung Dalam Angka Tahun 2003-2015, BPS Kota Bitung

Untuk mengetahui nilai murni dari data data tersebut maka di buat dalam logaritma natural (Ln) agar data tersebut lebih tinggi validitasnya.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

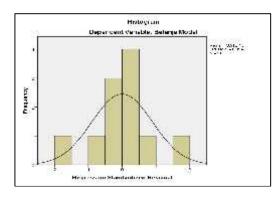
Descriptive Statistics

	Mea-	Std. Day ation	N
Delanja Modal	17,971	1.314:4	13
Fendapatan Asli Daerah.	16,5896	66434	te
Dena Alokası Umum	19,2519	44972	11

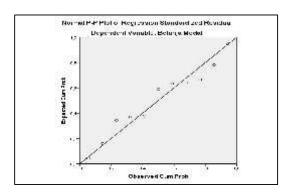
Sumber: Pengolahan Data, 2016

^{*}Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2014, BPS Sulut

Uji Normalitas



Grafik 1. Uji Normalitas Sumber: Pengolahan Data, 2016



Grafik 2. Uji Normalitas Sumber: Pengolahan Data, 2016

Kurva dependen dan *Regression Standardized Residual* membentuk gambar seperti lonceng. Berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat sedikit terdapat kemiringan. Berdasarkan tampilan Normal *P-P Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titiktitik menyebar disekitar garis diagonal. Berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dari garis diagonal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas Coefficients

	~	500		-
Col	r fil	lei	Of	nts"

		unstandardized Oceffdients		Standardized Oberbierts			Collinea ity Statistics	
Model		B S.J Eno		Bela	8 9	SIG	To a ance	ИF
8)	(Constant)	43,025	6,725	11,2-5,11	6,398	,300		
	Fendapatan Asii Daeran	-,924	,497	-,469	-2,174	, 36*	,254	4.578
	Dana Alexasi Jimum	3,902	,631	*,300	6,262	,300	,214	4.578

a. Dependent variable: Be anja Modali

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan output pada *Coefficient* terlihat bahwa nilai TOL (*tolerance*) X₁ dan X₂ sebesar 0,214, dan nilai VIF (*variance infloating factor*) variabel X₁ dan variabel X₂ sebesar 4,678, 2 variabel tesebut memiliki nilai yang sama. Dengan melihat VIF variabel PAD dan DAU lebih kecil dari 10, maka pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	Sunnary	

Mode 3					Crange Strictes					
	48q.sre	Adjusted Risk Enter of Southern Programme Programme	R Bquara Chingo	- Charge	m	±12	Sig. = Abarga	Cultin Walson		
1	,9594	,520	300),41456	,920,	45,297	- 2	. 8	(10)	2508

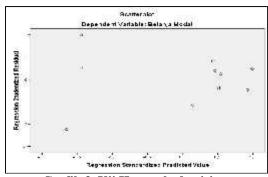
a, Pradictors (Consiam) Dana Albikas Umum Pandapatan Asi Daerah

: Desence: Var die Belaga Mica.

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Pada output model summary telihat bahwa nilai DW 2.508 dengan n=11, K=2 maka diperoleh nilai dL=0,658 dan dU=1,604. Karena nilai DW terletak di antara dU dengan 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi yang tanpa kesimpulan.

Uji Heteroskedastisitas



Grafik 3. Uji Heteroskedastisitas Sumber: Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tampilan pada tampilan *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbuh *regression studentized residual*. Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik pada model regresi yang terbentuk disebut homoskedastitisitas dan dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi dan Pengaruh Secara Parsial

Pengujian data dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda yakni menguji secara parsial atau simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan alur kerangka hipotesis yang ada diatas, maka dibuat persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = +b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sesuai dengan persamaan regresi tersebut maka dapat diperoleh hasil analisis regresi berganda yang di uji menggunakan *software IBM SPSS 22*. Hasil persamaan regresi:

$$Y = -43,025 + -0.928X_1 + 3.952X_2$$

Pendapatan asli daerah mempunyai koefisien regresi berslope negatif sebesar 0,928 artinya apabila terjadi kenaikan variabel PAD sebesar 1%, maka belanja modal berkurang sebesar 0,928 atau 0,928%. Dana alokasi umum mempunyai koefisien regresi berslope positif sebesar 3,952 artinya apabila terjadi kenaikan variabel DAU sebesar 1%, maka belanja modal bertambah sebesar 3,952 atau 3,395%.

Pengujian Hipotesis Koefisien Korelasi

Tabel 5. Bivariate Correlations - Product Moment

	Correlations		
		Por dapatan As i Daptan	Jana Albkas Junium
Pancapalar As IDaarah	Pearson Correlation	331	,887
	Sig (2-falled)		,000
	N	11	11
Cana Alokasi Umum	Pearach Correlation	,887	1
	Sig. (2-falled)	3000	
	N	11	- 11

** Correlation is significant withe 3.31 level (Fire ed)

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Pada output diatas terlihat bahwa korelasi antara PAD dan DAU sebesar 0,887 dengan sig 0,000 (sangat signifikan), serta DAU dan PAD sebesar 0,887 dengan sig 0,000 (sangat signifikan). Artinya, PAD dan DAU memiliki keeratan hubungan korelasi sebesar 88,7% dengan nilai signifikansi 0,00

Koefisien Determinasi

Melakukan validitas model melalui indikator koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi

V229 T						îн	y Stiel:	<u> </u>		
	4	FSLER	T FSque	Adjusted v St. Entriy 7 PiSquare Equare dre Estimate	State Entropy transfer	Fisque Suge	7 Marya	f°	in.	il) i Surje
1	5469	922	901	,41456	12)	E 257	2	- 1	::)	2,5X

a, Had obra (Constant, Jana Abras Chum Pendapaan Kar Jases)

s, Japan sart Variabia Balanja Vodali

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,92 menunjukkan bahwa 92% informasi yang terkandung di dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 8% dijelaskan oleh error dan variabel lain diluar model. Variabel PAD dan DAU dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal sebesar 92% sedangkan 8% dijelaskan oleh faktor variabel lain diluar penelitian ini.

Uji t (secara parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients'

		and induded Carlosus		Standardbed Costoberts			
76:e		3	354 Emer	3:l:	69	564	
2.00	Constant)	273,250	K 525	9	-0,391	11:11	
	Poncasaran Asil Daoran	7,578	127	0.086	-37.64	1121	
	Cana Aleka si Umum	2,552	621	7.780	5,282	11211	

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hipotesis: H_0 : i = 0 PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

H₁: i 0 PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Kriteria Uji: Jika sig penelitian (t) 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Jika sig penelitian (t) 0,05 maka H₁ ditolak dan H₀ diterima.

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,061 0,05, dengan arah koefisien negatif. Berarti PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal namun dalam taraf signifikansi alpha 0,10 masih bisa diterima, sehingga disimpulkan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan arah koefisien negatif. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah -0,928, besaran angka ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh sebesar 0,928% terhadap belanja modal.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hipotesis: $H_0: i=0$ DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

H₁: i 0 DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

Kriteria Uji: Jika sig penelitian (t) 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Jika sig penelitian (t) 0,05 maka H₁ ditolak dan H₀ diterima

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,00 0,05, dengan arah koefisien positif. Berarti DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah -3,952, besaran angka ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh sebesar 3,952% terhadap belanja modal.

Uji F (secara simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

Moc	≣I .	Sum of Squares	af	Mean Square	ŧ	Эç.
1	Regression	15,913	2	7,957	46,297	,550h
	Rusidus	1,375	n	,172	5.0.0000	
	otet	17,283	10	57010		

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Clanstard), Dana Alokasi Umum, Pandapatan As i Diaerah

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

Hipotesis: $H_0: _1 = _2 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal.

 H_1 : $_1$ $_2$ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh PAD dan DAU

terhadap belanja modal.

Kriteria Uji:

Jika sig penelitian (F) 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima

Jika sig penelitian (F) 0,05 maka H₁ ditolak dan H₀ diterima

Hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,00 0,05, dengan arah koefisien positif. Berarti DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah 46,297.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal secara Parsial

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,061 0,05, dengan arah koefisien negatif. Berarti PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal namun dalam taraf signifikansi alpha 0,10 masih bisa diterima, sehingga disimpulkan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan arah koefisien negatif. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah -0,928, besaran angka ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh sebesar 0,928% terhadap belanja modal. Berpengaruh negatif dan signifikan dapat diartikan bahwa jika proporsi PAD pemerintah Kota Bitung semakin ditingkatkan, maka belanja modal akan berkurang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang ada namun dalam faktual yang terjadi dilapangan seperti ini. Hal tersebut jika dianalis lebih lanjut kemungkinan terjadi injeksi dan kebocoran terhadap pengalokasian PAD – belanja modal, atau PAD lebih disalurkan terhadap belanja lainnya diluar belanja modal seperti belanja pegawai, bantuan sosial, dan lainnya.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal secara Parsial

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,00 0,05, dengan arah koefisien positif. Berarti DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah -3,952, besaran angka ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh sebesar 3,952% terhadap belanja modal. Berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa jika proporsi DAU pemerintah Kota Bitung semakin ditingkatkan oleh pemerintahan pusat, maka al okasi belanja modal akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dan faktual terjadi di lapangan. Maka disimpulkan pengalokasian belanja modal, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya di ambil dari DAU

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal secara Simultan

Hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,00 0,05, dengan arah koefisien positif. Berarti DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang diperoleh adalah 46,297. Berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa jika proporsi PAD dan DAU pemerintah Kota Bitung semakin meningkat, maka alokasi belanja modal akan meningkat juga. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dan scara empirik hal tersebut telah teraktualisasi di pemerintahan Kota Bitung. Maka disimpulkan pengalokasian proporsi belanja modal dipengaruhi dari pendapatan asli daerah Kota Bitung sendiri, dan dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Bitung.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanaja Modal pada pemerintahan Kota Bitung.
- 2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan erhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kota Bitung.
- 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanaja Modal pada pemerintahan Kota Bitung.

Saran

- 1. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama, disarankan agar melaksanakan penelitian dengan objek yang lebih luas tidak hanya di pemerintahan Kota/Kabupaten tertentu saja, untuk data yang digunakan diharapkan dengan kurun waktu yang lebih banyak juga bisa digunakan dengan mengkombinasikan dengan data *cross section* agar kevaliditasannya lebih baik. Demikian pula dengan alat analisis dan variabel yang digunakan, dengan menggunakan alat analisis yang lebih kompleks seperti data panel, analisis jalur, dan SEM, memungkinkan mendaptkan hasil yang lebih baik. Serta, variabel yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi mungkin akan mendapatkan hasil yg berbeda dan lebih cocok digunakan terhadap alokasi belanja modal. Artinya, kemungkinan ada variabel lain selain PAD yang lebih menjelaskan model terhadap belanja modal.
- 2. Apabila belanja modal meningkat maka dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi, juga peranan belanja modal dapat langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah Kota Bitung diharapkan memperhatikan sektor-sektor yang berkaitan dengan alokasi belanja modal seperti PAD dan sumber-sumber sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Asiri, Auliansyah Arief Ardhana. 2016. Pengaruh Belanja Modal & Investasi Swasta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Manado. Universitas Samratulangi.
- [2] Darwanto dan Sari, Yulia Yustika. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sektor Publik, Vol 08 No.01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta

[3] Keefer, Philip and Khemani. 2003. *Democracy, Public Expenditures, and The Poor*. World Bank Policy Research Working Paper 3164.

Buku

- [4] Badan Pusat Statistik. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. *Bitung Dalam Angka*. BPS Kota Bitung.
- [5] Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah, Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- [6] Halim, Abdul. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 3*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan tentang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah*. Presiden Republik Indonesia.
- [8] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Presiden Republik Indonesia.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Presiden Republik Indonesia.
- [10] Jurusan Akuntansi FEB Unsrat, 2013. *Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel, Tahun 2013*. FEB Unsrat. Manado
- [11] Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan; Teori dan Aplikasi. Andi Offset. Yogyakarta. Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- [12] http://www.suaramerdeka.com. Diakses pada 20 November 2012 Pukul 16.25.